

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Amir. W (1997:45) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan”.

Sedangkan menurut Abubakar. A & Wibowo (2004:60) akuntansi merupakan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan.”

Menurut Abubakar. A & Wibowo (2004:61) maka akuntansi terdiri dari tiga aktivitas atau kegiatan utama, yaitu:

1. Aktivitas indentifikasi yaitu mengidentifikasikan transaksi-transaksi yang telah terjadi dalam perusahaan.
2. Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis

3. Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun pihak eksternal.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta penganturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi, sebagai berikut:

1. **Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)**
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/ manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
2. **Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)**
Adalah akuntansi yang kegiatan utama adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
3. **Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)**
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditunjukkan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).
4. **Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)**
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara objektif.
5. **Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)**
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
6. **Sistem Akuntansi (*Accounting System*)**
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

7. **Akuntansi anggaran (*Budgeting*)**
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
8. **Akuntansi Pemerintah (*Government Accounting*)**
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.
9. **Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)**
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dll.
10. **Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)**
Salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalkan mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.2 Ruang Lingkup Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2011:5) :

“Financial statement are the principal means through which a company communicate it’s financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms”.

Pengertian laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2015:2), adalah:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menghasilkan suatu informasi yang sangat penting bagi kondisi perusahaan dan menjadikan laporan tersebut menjadi gambaran untuk mengetahui hasil kinerja yang telah tercapai oleh perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan, hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan laporan keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (2015:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2011:5) :

“The objective-general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that a useful to present and potential equity investors, leaders, and the other creditors is making decisions is their capacity providers. Information that is decision-useful to investors may also be useful to other users of financial reporting who are not investors”.

Menurut Hery (2012:5) adalah sebagai berikut:

“Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang intinya “Tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

2.1.2.3 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap pada umumnya terdapat beberapa jenis,

Menurut Fahmi (2012:3-4) jenis laporan keuangan yaitu:

- a. Neraca, menunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.
- b. Laporan Laba Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beba, laba atau rugi bersih, dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
- c. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas penyajian laporan pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.
- d. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama satu periode akuntansi.

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan yang di uraian di atas bahwa ada 4

jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemegang sahan dam laporan arus kas yang dimana untuk menghitung dan menginterpretasikan profitabilitas dan *leverage*.

2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan

keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Sukirno Agoes (2013:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai

berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Waluyo (2014:35) menjelaskan akuntansi pajak adalah sebagai

berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.3.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukirno Agoes (2013:11) adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Mata Uang, sauna mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi denan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi daru satu period eke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

2.1.4 Ruang Lingkup Pajak

2.1.4.1 Definisi Pajak

Pajak adalah salah satu unsur yang cukup penting bagi suatu negara guna mendanai segala bentuk pengeluaran negara. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Peraturan

Perundang-undangan perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut: "... kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), pajak merupakan:

"... kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak adalah sebagai berikut:

"... iuran wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Sari (2013:35), pajak adalah sebagai berikut:

"... suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan".

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah diungkapkan oleh para ahli, menurut Waluyo (2010:6), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalkan dimasukkan sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2010:3), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak penjualan atau Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pajak subjeknya, yang selanjutnya dicari objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
 - a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan (BM).
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak

Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajakn Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.4.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:8) perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlawanan Pasif
Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan ajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta teknik pemungutan pajak itu sendiri.
- b. Perlawanan Aktif
Perlawanan pajak secara aktif terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.1.4.6 Manajemen Pajak

Pajak adalah salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut Pohan (2013:3) salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

“ Dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba”.

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberik kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh *tax manger* untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu:

1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Tax evasion merupakan tindakan yang illegal yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Oliver Oldman dan Moh. Zain yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:148) *tax evasion* tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak Paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung adanya.
- c. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Definisi Profitabilitas

Rasio profitabilitas menyediakan evaluasi menyeluruh atas kinerja perusahaan dan manajemennya. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan perusahaan antara lain untuk memperoleh keuntungan (*profit*) dan meningkatkan nilai perusahaan. Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang baik pihak internal maupun eksternal. Penilaian profitabilitas akan menunjukkan seberapa efektif manajemen dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas bisnis untuk mencapai tujuan strategi perusahaan.

Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan. Berikut ini definisi mengenai profitabilitas oleh beberapa ahli, di antaranya:

Menurut Kasmir (2014:196), profitabilitas adalah sebagai berikut:
“... rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Menurut Sartono (2011:122), profitabilitas adalah sebagai berikut:

“... kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri”.

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2013:304), profitabilitas adalah sebagai berikut:

“... memberikan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada melalui kegiatan yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan jumlah cabang”.

Menurut Samryn (2013:417) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“... suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti”.

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:53), profitabilitas adalah sebagai berikut:

“... rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya”.

Menurut Hery (2016:104), profitabilitas adalah sebagai berikut:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal biasanya”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu untuk memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

2.1.5.2.1 Tujuan penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2014:197).

Menurut Kasmir (2014:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu,
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktivitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri,
7. Dan tujuan lainnya.

2.1.5.2.2 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2014:198), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode,
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Manfaat lainnya.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Profitabilitas

Terdapat beberapa pengukuran tingkat profitabilitas di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Hasil pengukuran tersebut dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen.

Menurut Sartono (2011:123), terdapat beberapa perhitungan rasio profitabilitas. Adapun jenis-jenis profitabilitas ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)
- b. *Net Profit Margin* (Margin Laba bersih)
- c. *Return On Assets* (ROA)
- d. *Return On Equity* (ROE)
- e. *Earning Power*

Berikut ini merupakan jenis-jenis yang termasuk dalam rasio profitabilitas menurut Mahmud M Hanafi dan Abdul Halim (2016:81-82), di antaranya:

2.1.5.3.1 Profit Margin

“Rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu”.

Secara sistematis *profit margin* dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2.1.5.3.2 *Return On Equity (ROE)*

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini terkait dengan keuntungan perusahaan terhadap sumber pembiayaan modal”.

Secara sistematis *Return On Equity (ROE)* dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal saham}}$$

2.1.5.3.3 *Return On Investment (ROI)*

“Rasio antara laba operasional dengan total aktiva (%). Rasio ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan (modal asing dan modal sendiri), makin tinggi rasio ini semakin baik”. Rumus yang digunakan untuk mencari ROI adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total investasi}} \times 100\%$$

2.1.5.3.4 *Gross Profit Margin*

“menggambarkan presentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan”. GPM diperoleh dengan cara, sebagai berikut:

$$Gross\ Profit\ Margin = \frac{Gross\ Profit}{Revenue} = \frac{Net\ Sales - COGS}{Revenue}$$

2.1.5.3.5 *Return On Assets (ROA)*

“Perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI”.

$$Return\ On\ Assets = \frac{Laba\ setelah\ pajak\ atau\ laba\ bersih}{Total\ aktiva}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Assets* (ROA), karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

2.1.5.3.5.1 *Pengertian Aset*

Menurut Martini, dkk (2012:138), definisi aset adalah sebagai berikut:

“... sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan di peroleh entitas”.

Menurut Keiso, *et al* yang dialih bahasakan oleh Salim (2008:193), definisi aset adalah sebagai berikut:

“... manfaat ekonomi yang mungkin di peroleh di masa depan atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pegurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.

2.1.5.3.5.2 Jenis-Jenis Aset

Menurut Munawir (2010:17), klasifikasi atau jenis-jenis aset adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap (*Fixed Assets*)
Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit).
2. Aset tidak berwujud (*Ingtangible Assets*)
Aset tidak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.

Menurut Reeve,*et al* (2010:223), jenis-jenis aset adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap (*Fixed Assets*)
Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Contoh: gedung, mesin, peralatan, dan tanah.
2. Aset tidak berwujud (*Ingtangible Assets*)
Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Contoh: hak paten, hak cipta, merek dagang dan *goodwill*.

Menurut Munawir (2010:14), aset dapat diklasifikasikan mejadi dua bagian utama yaitu:

1. Aset lancar
Aset lancar adalah uang kas dan aset lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau di konsumer dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).
2. Aset tidak lancar
Aset tidak lancar adalah aset yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).

2.1.5.4 Definisi Laba

Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Laba menurut akuntansi secara operasional sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yaitu berkaitan dengan pendapatan tersebut. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba merupakan salah satu petunjuk tentang kualitas manajemen serta operasi perusahaan tersebut, yang berarti mencerminkan nilai perusahaan.

Menurut James M. Reeve *et al* dengan dialihbahasakan Damayanti Dian (2009:3), laba adalah:

“... selisih antara uang atau jasa yang dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa”.

Menurut Wild dan Ubramayan dialihbahasakan Yanti Dewi (2012:5), definisi laba adalah:

“... mengukur bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode dan pada umumnya sama dengan arus kas bersih satu periode ditambah nilai sekarang arus kas yang diharapkan terjadi dimasa depan”.

Menurut Harahap (2013:267), pengertian laba adalah:

“... perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendaptkan penghasilan itu”.

Menurut Suwardjono (2008:464), pengertian laba adalah sebagai berikut:

“... imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa)”.

Menurut PSAK No.25 (2007:25,2-25,3), definisi laba adalah sebagai berikut:

“... semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu pendapatan dan beban dalam suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba/rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperoleh sebaliknya”.

Menurut Hidiatoro (2013:31), yang dimaksud dengan laba adalah

“... salah satu indikator kesuksesan suatu badan usaha karena laba dapat dijadikan dan efektivitas suatu perusahaan. Semakin tingginya laba merupakan salah satu cerminan keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk atau

jasanya. Oleh karena itu, laba merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode. Laba adalah alat yang baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan., dengan kata lain efektivitas dan efisiensi dari suatu usaha secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihinya.

2.1.5.5 Karakteristik Laba

Chariri dan Ghozali (2007:214), menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

2. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,
3. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
4. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
5. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu dan,
6. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut.

2.1.5.6 Jenis-Jenis Laba

Ada 2 (empat) jenis laba yang harus diperhatikan menurut Kasmir (2013:303) adalah sebagai berikut:

1. Laba kotor
Laba kotor (*gross profit*) adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhanyang pertama sekali perusahaan peroleh.

2. Laba bersih (*Net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Menurut Wiwin dan Ilham(2010:143), jenis-jenis laba dalam hubungannya terdiri dari:

1. Laba kotor
Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, disebut laba kotor karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
2. Laba dari operasi
Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dikurangi dengan total beban operasi. Biaya operasi adalah biaya yang berhubungan dengan operasi sehari-hari perusahaan.
3. Laba bersih
Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

2.1.5.7 Pertumbuhan Laba

Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Pertumbuhan laba adalah perubahan presentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik, mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, karena besarnya dividen yang akan dibayar di masa yang akan datang sangat bergantung pada kondisi perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:12), pertumbuhan laba adalah: “... penghasilan bersih (laba) sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (*Return On Investment*) atau laba per saham (*Earning Per Share*)”.

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya (Harahap, 2013:310).

$$\text{Pertumbuhan Laba} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun}_t - \text{Laba Bersih Tahun}_{t-1}}{\text{Laba Bersih Tahun}_{t-1}}$$

Keterangan : Laba Bersih Tahun_t = laba bersih tahun berjalan

Laba Bersih Tahun_{t-1} = laba bersih tahun sebelumnya

2.1.5.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Menurut Angkoso (2006:52), pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya perusahaan
Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi,
2. Umur perusahaan
Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah,
3. Tingkat *leverage*
Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba,
4. Tingkat penjualan
Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi,
5. Perubahan laba masa lalu
Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

2.1.6 *Financial Leverage*

2.1.6.1 *Definisi Leverage*

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. *Leverage* merupakan penggunaan aset atau aktiva tetap dan sumber dana di mana untuk penggunaan aktiva tetap dan dana pinjaman tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap dan beban bunga. Semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan dan semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Menurut Hery (2016:70), *leverage* adalah sebagai berikut:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset”.

Menurut Hartono dan Harjito (2008:295), rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“... mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap”.

Menurut Irham fahmi (2012:127), rasio *leverage* adalah

“... mengukur seberapa perusahaan dibiayai oleh hutang”.

Pengertian lain *leverage* menurut Susan Irawati (2010:172), adalah:

“... suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan”.

Rasio *leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Jika tingkat *leverage* operasi sudah relative tinggi, perusahaan cenderung untuk mengurangi tingkat *leverage* keuangan (mengurangi proporsi utangnya).

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage Ratio*

2.1.6.2.1 Tujuan *Leverage Ratio*

Menurut Kasmir (2014:153), ada beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya(kreditor),
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang,

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang,
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva,
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang,
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih,
8. Tujuan lainnya.

2.1.6.2.2 Manfaat *Leverage Ratio*

Menurut Kasmir (2014:154), ada beberapa manfaat dalam perusahaan menggunakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya,
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai hutang,
5. Untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang,
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kainya modal sendiri,
8. Manfaat lainnya.

2.1.6.3 Jenis-Jenis *Leverage*

2.1.6.3.1 *Operating Leverage*

Operating leverage timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Beban-beban tetap operasional tersebut misalnya biaya depresiasi/penyusutan atau aktiva tetap yang dimilikinya. Selain itu *leverage* operasional dapat digambarkan secara mudah dengan menggunakan

laporan laba rugi. *Leverage* ini membandingkan pengaruh pendapatan (penjualan) terhadap perubahan keuntungan operasional.

Menurut Mamduh M Hanafi (2004:327), *operating leverage* adalah sebagai berikut:

“... seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional”.

Menurut Sutrisno (2012:198), *operating leverage* adalah sebagai berikut:

“... penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan *leverage* operasi oleh perusahaan diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tetap tersebut cukup untuk menutupi biaya tetap dan variabel”.

Perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi (relatif) terhadap biaya variabel dikatakan menggunakan *operating leverage* yang tinggi. Dengan kata lain, *Degree of Operation Leverage* (DOL) untuk perusahaan tersebut tinggi sebagai presentase perubahan dalam laba operasi sebagai akibat presentase perubahan dalam unit yang dijual. Adapun cara untuk menghitung *Degree of Operation Leverage* (DOL), yaitu:

$$\text{DOL} = \frac{\text{Presentase Perubahan EBIT}}{\text{Presentase Perubahan Penjualan}}$$

2.1.6.3.2 Total Leverage

Total *leverage* dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam menggunakan biaya tetap, baik biaya-biaya tetap operasi maupun biaya-biaya tetap finansial untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar

saham biasa. Pengukuran tingkat total *leverage* atau *Degree of Total Leverage* (DTL) dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pengukuran tingkat *operating* dan *financial leverage* (DOL dan DFL), adalah sebagai berikut:

$$DFL = \frac{S-BV}{EBIT-I} = \frac{Q(P-V)}{Q(P-V)-BT-1}$$

2.1.6.3.3 *Financial Leverage*

Kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan merupakan penerapan *financial leverage* di mana perusahaan membiayai kegiatannya dengan menggunakan modal pinjaman serta menanggung suatu beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham. *Financial leverage* timbul karena adanya kewajiban-kewajiban *financial* yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2012:62), *financial leverage*, yaitu

“... mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan ditinjau oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh model”.

Menurut Bambang Riyanto (2013:375), *financial leverage* adalah

“... penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa (*Earning per Shares*)”.

Adapun pengertian lain dari *financial leverage* menurut Sartono (2010:38),
adalah:

“... penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa penggunaan sumber dana tersebut akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham”.

Pengukuran *financial leverage* atau sering disebut *Degree of Financial Leverage* (DFL), yaitu presentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat presentase perubahan dalam laba operasi. Adapun cara untuk menghitung *Degree of Financial Leverage* (DFL), yaitu:

$$\text{DFL} = \frac{\text{Presentase Perubahan EPS}}{\text{Presentase Perubahan EBIT}}$$

$$\text{DOL} = \frac{S - BV}{S - BV - BT} = \frac{Q(P - V)}{Q(P - V) - BT}$$

Keterangan : Q = Jumlah unit produk

P = harga jual per unit

V = Biaya variabel per unit

T = Biaya tetap

I = Biaya bunga

Berdasarkan uraian diatas *financial leverage* terjadi akibat perusahaan menggunakan sumber dana dari hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung bebas tetap.

2.1.6.3.4 Ratio Leverage

Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membayangkan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extream leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalm tingkat utang yang tinggi dan sulit. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin buruk keadaan keuangan perusahaan karena semakin tinggi pula resiko keuangan yang ditanggung oleh perusahaan.

2.1.6.3.4.1 Debt o Equity Ratio

Menurut Wild dan Subramanyam (2012:61), *debt of equity ratio* adalah:

“... menunjukkan perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan”.

DER diperoleh dengan cara:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

2.1.6.3.4.2 Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Menurut Wild dan Subramanyam (2012:61), menjelaskan apabila *debt to equity ratio* membandingkan antara seluruh utang terhadap ekuitas, maka LTDtER

menunjukkan perbandingan antara utang jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio ini diperoleh dengan cara:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

2.1.6.3.4.3 *Time Interest Earned Ratio (TIER)*

Menurut Wild dan Subranyamam (2012:62), *time interest earned ratio* adalah:

“... rasio yang menggambarkan kemampuan hasil operasional perusahaan untuk menutupi kewajiban bunga”. TIER diperoleh dengan cara:

$$\text{TIER} = \frac{\text{Earning Before Interest \& Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

2.1.6.3.4.4 *Fixed Charge Coverage*

Menurut Kasmir (2014:162), *fixed charge coverage* adalah sebagai berikut: “... rasio yang menyerupai *time interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang dan menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya Bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang”.

Rasio ini diperoleh dengan cara:

$$\text{Fix Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/Lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}$$

Dari *Ratio Leverage* diatas, penulis mengambil salah satu untuk digunakan dalam penelitian yaitu *Financial Leverage* yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang (Irham Fahmi, 2012:62). Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)*.

2.1.6.3.4.5 Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)

Menurut Kasmir (2014:156), definisi *debt to assets ratio (debt ratio)* adalah sebagai berikut:

“... rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”. *Debt to assets ratio* ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu:

$$\text{Debt To Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut Wild dan Subramanyam (2012:61), definisi *Debt Ratio* adalah:

“... menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya”. DR diperoleh dengan cara:

$$\text{DR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut Irham Fahmi (2012:147), *debt to assets* atau *debt ratio* adalah sebagai berikut:

“ ... rasio yang diperbolehkan dari perbandingan total utang dibagi dengan total aktiva. Apabila *debt to assets* atau *debt ratio* semakin tinggi, sementara proporsi total aktiva tidak berubah maka utang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Total utang yang semakin besar berarti rasio finansial atau rasio kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila *debt to assets ratio* semakin kecil maka utang yang dimiliki perusahaan juga semakin kecil dan ini berarti resiko finansial perusahaan mengembalikan pinjaman semakin kecil”.

Adapun rumus *debt to assets* atau *debt ratio* menurut Irham Fahmi (2012:147) adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.6.4 Definisi Hutang

Semua perusahaan kecil maupun perusahaan besar mempunyai hutang dalam perusahaan yang dibentuknya. Definisi hutang menurut Mamduh M Hanafi (2010:29), adalah sebagai berikut:

“... sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dan kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau

memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Hutang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang dan jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam”.

Menurut Munawir (2010:18), hutang adalah sebagai berikut:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang.”.

Menurut Haryanto (2009:292), utang adalah:

“... kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, atau barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya kepada pihak lain yang penyelesaiannya diharapkan sehingga mengakibatkan arus kas keluar yang mengandung manfaat. Semakin tinggi hutang, maka dapat menyebabkan pengembalian bagi para pemegang saham dapat menjadi tidak pasti.

2.1.6.5 Jenis-jenis Hutang

Menurut Munawir (2010:18), jenis-jenis hutang dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Hutang lancar (hutang jangka pendek)
Hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar meliputi antara lain:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagang secara kredit,
 - b. Hutang wesel, adalah hutang yang di sertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang,
 - c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan Karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara,
 - d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayaran,
 - e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya,
 - f. Penghasilan yang diterima di muka, adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.
2. Hutang jangka panjang
Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi hutang obligasi, hutang hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu, dan pinjaman jangka panjang yang lain.

2.1.6.6 Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang mempunyai pengaruh pendisiplinan perilaku manajer. Hutang akan mengurangi konflik agensi dan meningkatkan nilai perusahaan, peningkatan hutang dapat meningkatkan *leverage* sehingga meningkatkan kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkrutan.

Menurut Harmono (2011:137), kebijakan hutang adalah sebagai berikut:

“... keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terefleksi pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan”.

2.1.7 *Tax Avoidance*

2.1.7.1 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2013:10), pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“... upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak”.

Menurut Pohan (2013:23), *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“... upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak Karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey are*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Suandy (2011:20), penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“... suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan.

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) (Coouncil of Executive Secretaries of Tax Organization (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.7.2 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
 - b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
 - c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
 - d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
 - e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.
- Penghindaran

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

2.1.7.3 Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Data saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tabel pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term form the following regression $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NoLt-NOLt} - 1)$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deffered tax expense/ U.S STR	The total difference between book

		<i>and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/ $T_{Ait} = \beta T_{Ait} + \beta mi$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefit</i>	<i>Disclosed amount post- FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax Shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firm accused of engaging</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Menurut Dyreng, et al (2010), variabel *tax avoidance* dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *CETR* bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan *CETR* ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, *CETR* menggambarkan semua

aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan dan *CETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian dengan tujuan memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan oleh peneliti, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui posisi atau kedudukan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Rangkuman dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan *tax avoidance* dapat dilihat pada tabel 2.2 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Suyanto (Universitas Muhhamadiyah Surakarta)	Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Leverage mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2	Annisa (Universitas Sebelas Maret)	Pengaruh return on asset, debt to equity rasio dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Return on assets mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Debt to equity rasio mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Good corporate governance mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
3	Kurniasih dan Sari (Universitas Udayana)	Pengaruh profitabilitas, leverage, good corporate governance dan ukuran perusahaan pada tax avoidance.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance. Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Good corporate governance mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
4	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (Universitas Udayana)	Pengaruh rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas terhadap tax avoidance.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Rasio solvabilitas/leverage

			mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance.
5	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (Universitas Udayana)	Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Good corporate governance mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (Universitas Syiah Kuala)	Pengaruh leverage dan good corporate governance terhadap tax avoidance	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Leverage mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance. Good corporate governance mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance.
7	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (Universitas Udayana)	Pengaruh umur perusahaan, return on asset dan leverage terhadap tax avoidance	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Umur perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Return on asset mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance. Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance.
8	Rezka Olva (Universitas Negeri Padang)	Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9	Christine Harrington et,al	The Effect of Profitability and Leverage to Tax	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

		Avoidance on Banking Firms	Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Leverage mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance
10	Beryl Awuor Otieno et,al	The Relationship between ownship structure and tax avoidance	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax avoidance Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penulis yaitu dalam suatu rotasi bahwa persamaan dan perbedaan penelitian dengan penulis adalah berdasarkan analisis nyata yang merupakan suatu data yang dapat diuji melalui pengujian hipotesis maupun yang dapat menghasilkan kesimpulan sebenarnya. Sedangkan perbedaan dengan penulis merupakan hasil memindahkan sesuatu yang ada dari pengujian hipotesis menjadi suatu kesimpulan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menompang pembiayaan pembangun yang bersumber dari dalam negeri. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat “. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak adalah sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:23).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian ini *Return On Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) mengemukakan bahwa:

“*Return On Asset (ROA)* mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak”.

Pernyataan tersebut didukung oleh Chen *et.al* (2010) sebagai berikut:

”*Firm with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes*”.

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar kan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya”.

Hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Beryl Awour Otieno *et.al* (2015) sebagai berikut:

“*Probability is usually measured as either the return of assets or cash flow from operations. The higher the probability, the higher the tax avoidance rate a company caused by a company with a large profit led the company to tax avoidance to reduce tax*”.

2.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pernyataan tersebut didukung oleh Brigham dan Houston (2014:155) menyatakan bahwa:

“Leverage ratio is the that measures the extent to which the firm’s financial leverage must pay a fixed expense in the form of interest expense”.

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadillah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan”

Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Christine Harrington *et.al* (2013) sebagai berikut:

“In the context of the dynamic trade leverage following a refinancing event, these result support the no avoiders value leverage as part of an overall tax avoidance strategy, and are robust to alternative definitions of leverage, methods of refinancing event”.

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Chen dan Yuan *et.al* (2009) menyatakan bahwa:

“The ratio of financial statement can be seen as an indicator of tax expense”.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan

profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat (Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari, 2013).

Pernyataan tersebut didukung oleh Rego, S.O *et.al* (2013) menyatakan bahwa:

“The corporate profitability is the main determinant of its performance, has shown that firms with high profitability are most likely to engage in tax avoidance practices in order to reduce their tax liabilities”.

Selain profitabilitas yang tinggi, *leverage* (struktur utang) adalah rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012)

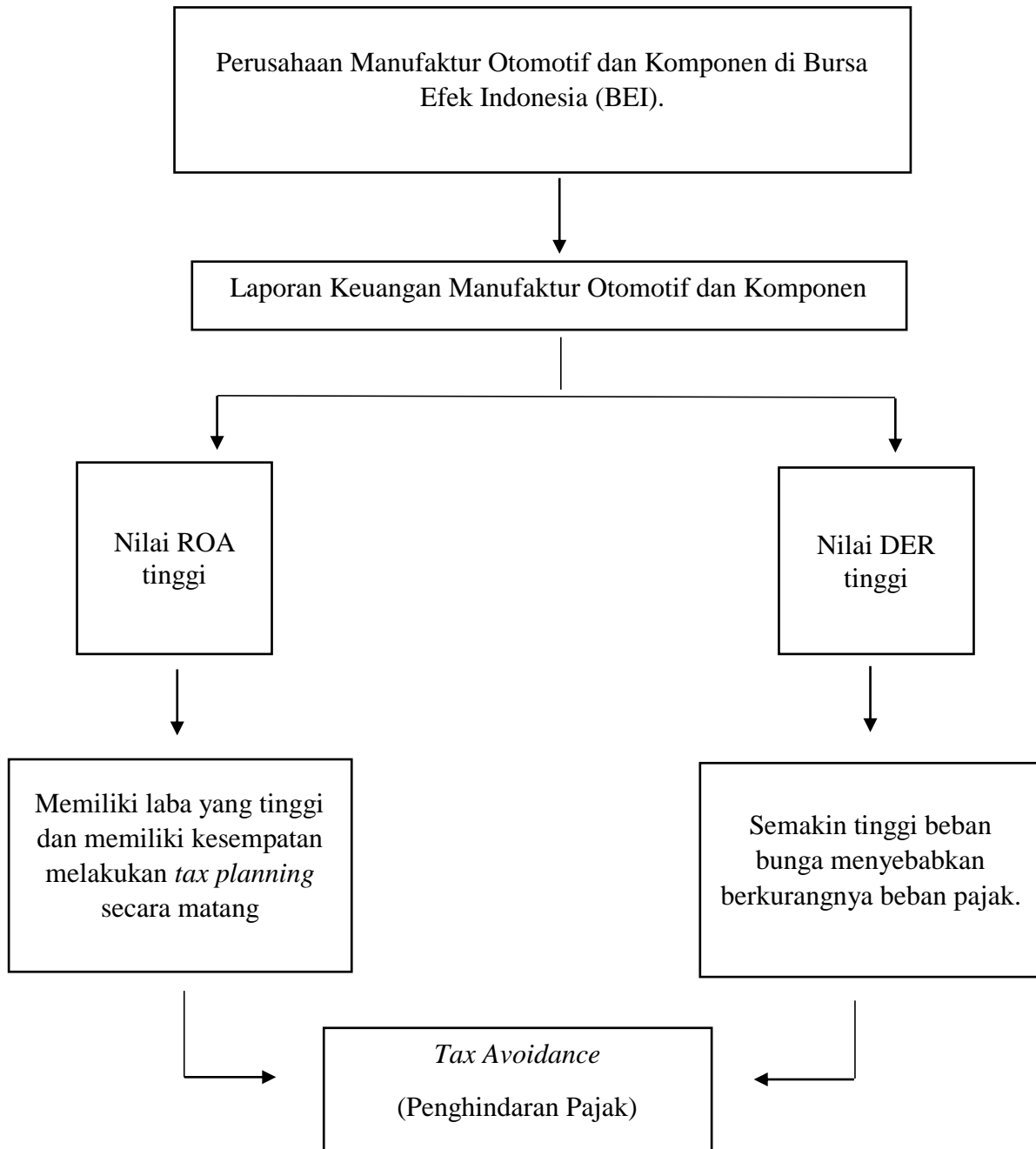
Pernyataan tersebut didukung oleh Dyreng *et.al* (2010) menyatakan bahwa:

“Highly indebted firms are likely to take advantage of the main characteristic of debt-capital (the fungibility of borrowed funds) in order to avoid a significant corporate tax burden. Thus, multinational group prefer to finance their subsidiaries with debt or equity”.

Hubungan profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yaitu adalah rasio keuangan apabila memiliki nilai yang tinggi keduanya dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H3: Profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*